

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah SWT, bertujuan akhir kepada Allah SWT, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah SWT. Aktifitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, impor, ekspor tidak lepas dari Allah (Yusuf, 1997: 31).

Islam memandang bahwa pemerintah juga bertanggung jawab atas tercapainya masyarakat yang ideal, yaitu : adil dan makmur dengan membela yang lemah serta terlibat dalam masalah perekonomian. Karena itu, khalifah harus menciptakan keseimbangan ekonomi dengan menyuplai rakyat yang miskin dengan harta yang diambil dari Baitul Mal. Dengan suplai tersebut bisa diwujudkan keseimbangan sosial.(Taqiyyudin, 2009 : 271)

Dalam Ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan dan papan harus dilandasi dengan nilai-nilai spiritualisme, dan dengan adanya keseimbangan dalam pengelolaan harta kekayaan. Selain itu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus berdasarkan batas kecukupan (*had al-kifayah*), baik atas kebutuhan pribadi maupun keluarga .(Marthon, 2004 : 66)

Alokasi Pendapatan Negara dalam pandangan Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Pendapat ini didasarkan atas kenyataan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak kekayaan telah memberi amanat kepada manusia untuk mengatur dan mengolah kekayaan disertai kewenangan untuk memiliki kekayaan tersebut .(Taimiyah, 1963 :672)

Perbedaan pendapat Ibnu Taimiyah (661 H \ 1263 M) dengan Muhammad Baqir Al Sadr (1353 H \ 1935 M) bisa terlihat dari perbedaan zaman karena rentang waktu yang cukup lama dan perbedaan kehidupan yang berkembang mempengaruhi pemikiran seseorang. Dapat terlihat dari kemajuan pola pikir Muhammad Baqir Al Sadr dibandingkan dengan Ibnu Taimiyah.

Pemilikan harta pada hanya beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan preseden/kejadian buruk bagi kehidupan.(Sudarsono, 2007 : 232) Berikut ini beberapa konsep Islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan alokasi dan distribusi pendapatan Negara antara lain :

1. Kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah. Di dalam Al-Qur'an telah di jelaskan dalam surat al-An'am (6) ayat 165 yang berbunyi:

بَعْضٌ دَرَجَاتٍ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ
لِئِبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” .(Qs. Al-an'am:165).

Allah telah menciptakan makhluknya sebagai pemimpin di muka bumi dan Allah yang telah menjadikan derajat manusia berbeda-beda, ada yang kaya dan ada pula yang miskin supaya hal itu dapat dijadikan sebagai suatu ujian, lalu Allah memberikan balasan atas amal yang dilakukan di dunia. Sehingga manusia tidak dapat menentukan dirinya berada dalam

posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah, karena yang menentukan hanyalah Allah.

Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Huud: 116

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي
الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا

مُجْرِمِينَ

Artinya :“Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.”

Dalam ayat diatas disebutkan “dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.” Apabila dalam suatu masyarakat terdapat kejadian yang demikian, orang yang mampu merendahkan orang yang kurang mampu, maka akan mengakibatkan orang yang tidak mampu tersebut menjadi rendah diri. Dan akan terjadi sifat yang tidak syukur nikmat. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya alokasi dan distribusi yang sesuai dan tepat.

2. Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam QS. Adz Dzariyat ayat 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya :“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.”

Pemerintah tentunya juga memiliki peranan penting dalam hal pendistribusian kekayaan kepada masyarakat. Karena seperti yang telah diterangkan oleh ayat di atas bahwa di dalam harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian atau orang miskin yang malu untuk meminta-minta.

3. Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infaq dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Terdapat dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya : Apa saja harta rampasan (*fay*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Allah menganjurkan bagi orang-orang yang mampu atau orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang kurang mampu melalui zakat, infaq dan shadaqah agar terjadi keseimbangan antara keduanya sehingga harta tidak beredar di kalangan orang kaya saja.

Imam Ali r.a diriwayatkan pernah mengatakan “Janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun.(Marthon, 2004 : 71)

Efisiensi alokasi adalah perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan setepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Efisiensi alokasi menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka akan mencapai alokasi yang efisien. Dengan adanya efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan politik. Dampak yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan yang didasarkan atas konsep Islam menurut (Marthon, 2004 : 71) adalah sebagai berikut:

1. Dalam konsep Islam perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dan bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekati diri kepada Allah.
2. Negara bertanggung jawab terhadap mekanisme alokasi dan distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok, atau golongan apalagi perorangan.
3. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik, yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan, seperti: sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, jembatan dan sebagainya.

Alokasi Pendapatan Negara sebaiknya digunakan untuk jalan jalan kebaikan dan mengandung masalah bagi dirinya dan bagi orang lain dengan cara mendistribusikan dan mengkonsumsi hasil pendapatan, harta dan kekayaan dengan cara yang islami.

Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi Menurut Muhammad Baqir Al Shadr, fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi terdapat beberapa tanggung jawab. Tanggung jawab atau fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi tersebut antara lain berkenaan dengan: 1. penyediaan akan terlaksananya Jaminan Sosial dalam masyarakat, 2. Berkenaan dengan

tercapainya keseimbangan sosial dan 3. Terkait adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi.

Menurut al Ghazali perilaku konsumsi harus didasari oleh kebutuhan mendapatkan sesuatu yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Lebih jelas lagi al Ghazali berpendapat bahwa tabiat manusia selalu menginginkan yang lebih atau memenuhi hawa nafsunya. Mencintai dan ingin terus mengumpulkan harta. (Al Ghazali, 1979 : 504)

Manusia cenderung menimbun dan menyimpannya. Bahkan jika seorang manusia sudah memiliki dua lembah emas maka ia akan menginginkan lembah emas yang ketiga. Menurut al Ghazali hal yang demikian adalah suatu kebodohan. Sebab telah mencintai sesuatu yang sebenarnya tidak berguna. Baik di dunia maupun diakhirat.

Selain itu pengaruh dari lingkungan mengenai barang- barang baru akan membuat konsumsi seseorang bertambah. Hal ini terjadi karena adanya motivasi yang berkaitan dengan kebutuhan harga diri.

Dengan demikian konsumsi menjadi suatu perilaku yang tidak terbatas dan bersifat matrealistik. Mementingkan kepuasan tanpa adanya dimensi spiritual yang dipertimbangkan. Konsumsi dalam ekonomi konvensional tidak memiliki orientasi pada masa depan. Baik di dunia maupun di akhirat. Dimensi spiritual dianggap sebagai sesuatu yang berada diluar wilayah ekonomi.

Banyaknya kasus konsumsi alkohol, narkoba, rokok, menunjukkan bahwa manusia saat ini hanya mementingkan kepuasannya saja. Tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang akan dialaminya di dunia dan di akhirat.

Al Ghazali menjelaskan bahwa perilaku konsumsi harus lebih mementingkan aspek spiritual agar tidak menimbulkan perilaku konsumsi yang berlebihan. Seperti contoh mengkonsumsi makanan sebagai kebutuhan untuk menghilangkan lapar. Mengkonsumsi pakaian sebagai

kebutuhan untuk melindungi tubuh dari rasa dingin dan panas agar badan tetap sehat. Sehingga dapat menjalankan statusnya sebagai hamba Allah dan menjalankan fungsinya sebagai Khalifatullah. (Al Qardhawi, 1997 : 31)

Ekonomi Islam memandang bahwa aktivitas konsumsi harus selalu dikaitkan dengan tujuan manusia diciptakan. Perilaku ini diartikan sebagai suatu aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk: Secara akademik peneliti memiliki beberapa alasan dalam melakukan penelitian ini antara lain:

Pertama: Sebagai kajian yang harus ditulis secara mendalam sehingga dapat terlihat lebih jelas tentang hakikat perekonomian suatu negara dalam pengalokasian dana pemerintah dalam suatu negara menurut pandangan Ibnu taimiyah dan Muhammad Baqir Al Sadr.

Kedua: kemajuan perekonomian suatu negara islam pada zaman dahulu dan berbagai pendapat dari tokoh-tokoh cendikiawan muslim yang membahas tentang suatu kenegaraan dalam mensejahterakan masyarakat.

Ketiga: Adanya perbedaan dan persamaan tentang alokasi pendapatan negara dalam berbagai hal meliputi tujuan, sumber-sumber pendapatan, dan cara pandang dari kedua tokoh tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis termotivasi untuk meneliti dan menganalisis lebih mendalam dengan judul **'ALOKASI PENDAPATAN NEGARA MENURUT IBNU TAIMIYAH DAN MUHAMMAD BAQIR AL SADR'**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja sumber-sumber Alokasi Pendapatan Negara menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad Baqir Al Sadr?
2. Bagaimana Alokasi Pendapatan Negara menurut Ibnu Taimiyah?

3. Bagaimana Alokasi Pendapatan Negara menurut Muhammad Baqir Al Sadr?
4. Bagaimana komparasi Alokasi Pendapatan Negara menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad Baqir Al Sadr?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terkait dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami sumber-sumber Alokasi Pendapatan Negara menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad Baqir Al Sadr?
2. Untuk mengetahui dan memahami Alokasi Pendapatan Negara menurut Ibnu Taimiyah?
3. Untuk mengetahui dan memahami Alokasi Pendapatan Negara menurut Muhammad Baqir Al Sadr?
4. Untuk mengetahui dan memahami komparasi Alokasi Pendapatan Negara menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad Baqir Al Sadr?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi tentang pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad Baqir Al Sadr mengenai Alokasi Pendapatan Negara.
 - b. Sebagai bahan litelatur, sumber inspirasi, ataupun referensi bagi para pembaca yang sedang melakukan penelitian mengenai Alokasi Pendapatan Negara Menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad Baqir Al Sadr.

2. kegunaan Praktis

Penelitian ini menambah wawasan keilmuan terutama bagi penulis, dan para pembaca pada umumnya tentang bagaimana Alokasi Pendapatan Negara

menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad Baqir Al Sadr . Serta memberikan gambaran kepada kita untuk menggunakan pendapatan sesuai dengan aturan nilai-nilai islam dengan tujuan mendapatkan ridho Allah SWT.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Jafar Nurasihin di Institut Islam Negeri Bengkulu 2015, dengan judul "Alokasi Pendapatan Negara Dalam Perspektif Ahli Ekonomi Islam" memberikan kesimpulan bahwa pada umumnya terdapat persamaan pemikiran antara keempat tokoh ahli ekonomi Islam bahwa Alokasi Pendapatan Negara yang utama adalah digunakan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu pendapatan yang diperoleh seorang muslim harus sesuai dengan ajaran dan perintah agama, dan menghindari semua larangan – larangan –Nya. Sedangkan perbedaan pemikiran antara keempat ahli ekonomi Islam di atas adalah pemikiran Yusuf Qardawi dan Abdul Mannan yang secara jelas bahwa seorang muslim sebaiknya mengalokasikan pendapatan dan hartanya untuk warisan keturunannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulida Agustina Hidayatul Wahidah di Universitas Negeri Islam (UIN) Sunan Ampel pada tahun 2018 dengan judul "Alokasi Pendapatan Negara Menurut Muhammad Baqir Al-Sadr Dan Relevansinya Dengan Sistem Jaminan Sosial Di Indonesia" memberikan kesimpulan Konsep jaminan sosial di Indonesia sesuai dengan konsep jaminan sosial *Muhammad Baqir al-Sadr* bahwa terdapat dua basis jaminan sosial, pertama basis timbal balik masyarakat dengan mewajibkan masyarakat membayar zakat, infaq, dan *shadaqah*. Kedua, merupakan tanggung jawab negara secara penuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya agar sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam. Di Indonesia untuk jaminan sosial mengalokasikan dananya sebesar Rp. 894,9 triliun, 43% dari total anggaran belanja negara yang berjumlah Rp. 2.080,5 triliun. Konsep kesejahteraan di Indonesia sesuai dengan konsep kesejahteraan sosial *Muhammad Baqir al-Sadr* bahwa konsep kesejahteraan bukan pemerataan pendapatan pada masyarakat, tetapi pemerataan

kemakmuran. Dari total dana untuk jaminan sosial yang berjumlah Rp. 894,9 triliun, apabila dibagi dengan banyaknya masyarakat miskin di Indonesia yang berjumlah 27.764,32 ribu jiwa, maka dana tersebut masih belum mencukupi, padahal banyak kebutuhan dari penduduk tersebut yang harus dipenuhi. Jadi meskipun secara konseptual sudah memenuhi, akan tetapi belum terimplementasi secara maksimal. *Muhammad Baqir al-Sadr* menggunakan prinsip intervensi negara untuk mengatur pendistribusian jaminan sosial agar terimplementasi dengan baik. Di Indonesia juga menggunakan prinsip intervensi negara untuk pendistribusian jaminan sosial melalui undang-undang jaminan sosial nomor 40 tahun 2004 dan undang-undang kesejahteraan sosial nomor 11 tahun 2009 yang berlandaskan undang-undang dasar 1945. Tetapi, dari jumlah rakyat miskin 27.764,32 ribu jiwa dengan total dana untuk jaminan sosial 43% dari total dana APBN menurut penulis masih belum mencukupi dan prinsip intervensi negara perlu lebih tegas lagi dan meningkatkan pengalokasian dana jaminan sosial agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa yaitu kesejahteraan sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Holis dengan judul: “Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam” Tahun 2018 pada UIN Walisongo memberikan kesimpulan bahwa: Fenomena penyimpangan distribusi barang dan jasa, baik minyak tanah, pupuk dan beras yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi dan kebijakan ekonomi yang diterapkan di Indonesia, yang saat ini masih didominasi oleh sistem ekonomi pasar (kapitalis). Sistem pendistribusian dalam sistem ekonomi kapitalis ini ternyata menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat serta menciptakan kemiskinan permanen bagi masyarakat sebab sistem ini berimplikasi pada penumpukan harta kekayaan pada sebagian kecil pihak saja. (Holis, 2016: 13)

Sistem ekonomi Islam menawarkan sistem pendistribusian ekonomi yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dan berbuat dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan yang disandarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Sistem distribusi ini menawarkan mekanisme dalam sistem distribusi ekonomi yang Islami,

yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi, dengan melibatkan adanya peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi produktif dan nonproduktif, sehingga dapat mewujudkan keadilan distribusi.

Kedua, Moh. Ah. Subhan ZA dengan judul: “Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Islam”. Tahun 2013 pada BAZ dan LAZ Indonesia memberikan kesimpulan bahwa: Distribusi pendapatan merupakan bagian yang penting dalam membentuk kesejahteraan. Dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi, melainkan juga aspek sosial dan politik. Oleh karena itu, Islam memberi perhatian lebih terhadap distribusi pendapatan dalam masyarakat. Islam memang mengakui hak milik pribadi, akan tetapi hak milik pribadi tersebut harus bisa didistribusikan dengan baik. Milik pribadi tersebut dipergunakan untuk nafkah diri dan keluarga dalam menjalani kehidupan, berinvestasi untuk modal produksi sehingga bisa memberikan kesempatan kerja bagi orang lain, memberikan pertolongan untuk orang lain melalui zakat infaq dan shodaqoh. Dengan cara seperti ini, maka harta tidak hanya berputar pada orang kaya saja yang mengakibatkan adanya kesenjangan dalam kehidupan sosial.

Melihat penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sementara 13 di sisi lain masih banyaknya kesenjangan antara yang kaya dan miskin, maka zakat, infaq dan shodaqoh merupakan hal yang menarik untuk dikaji dan diterapkan sebagai kebijakan fiskal atau diberdayakan melalui BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang ada di Indonesia. Peran BAZ dan LAZ perlu dioptimalkan dalam masalah pemberdayaan zakat infaq dan sodaqoh ini karena meskipun penduduknya mayoritas muslim ternyata mereka banyak yang enggan mengeluarkan derma tersebut. Kalaupun sebagian orang kaya ada yang mengeluarkan zakat, infaq, dan sodaqoh dengan diberikan secara langsung oleh dirinya kepada fakir miskin. Pemberdayaan melalui BAZ dan LAZ akan lebih baik daripada dikeluarkan secara individu dikarenakan akan terkoordinasi, baik dalam penarikan maupun penyalurannya.

Oleh karena Negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi, maka pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam penataan masalah ini. Peran BAZ dan LAZ harus dioptimalkan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Persamaan penelitian ini adalah berdasarkan perspektif Islam.

Sedangkan Perbedaan dengan penelitian ini adalah sudut pandang yang digunakan dalam penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan sudut pandang secara spesifik dalam distribusi zakat pada suatu lembaga, sedangkan penelitian ini membahas Alokasi Pendapatan Negara berdasarkan perspektif ahli ekonomi secara umum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Reseach*). Studi pustaka memiliki dua jenis penelitian, yaitu: pertama: penelitian studi pustaka yang membutuhkan kajian empirik di lapangan, kedua: penelitian studi pustaka yang membutuhkan kajian filosofik dan teoritik yang ada kaitannya dengan fakta empirik. (Muhadjir, 1996 : 159)

Objek dalam penelitian ini adalah buku atau karya yang ditulis oleh para ahli ekonomi Islam sebagai gambaran dari pemikirannya. Penelitian ini bersifat kualitatif yang akan menghasilkan data secara deskriptif sesuai dengan apa yang ada dalam karya para ahli ekonomi Islam.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yaitu: sumber data sekunder berupa buku atau kitab karya dari para Ibnu taimiyah : *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, beberapa jurnal yang berisi tentang penelitian terkait dengan judul tersebut dan Muhammad Baqir Al Sadr : *Iqtishaduna* dan beberapa jurnal yang berisi tentang penelitian terkait dengan judul tersebut

Penelitian ini adalah penelitian literatur, karena itu data dihimpun dari sumber-sumber tertulis yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan

penelitian ini. Buku dan karya yang merupakan sumber data dibaca dan ditelaah dengan seksama kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian yang akan diolah peneliti dan dituangkan kedalam sebuah tulisan yang sistemik dan sistematis untuk ditarik kesimpulannya sebagai hasil dari hasil penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data yang dihimpun secara sistematis dianggap cukup oleh peneliti. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah content analysis yang akan memberikan gambaran sejelas mungkin tentang konsep Alokasi Pendapatan Negara Menurut Ibnu Taimiyah dan Muhammad Baqir Al Sadr.

G. Sistematika Penulisan

Rangkaian penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Wujud dari susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah yang mengenai obyek kajian dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Meliputi tinjauan umum tentang berisi kajian teoritik mengenai pemikiran para ahli ekonomi Islam yaitu Ibnu Taimiyah dan Muhammad Baqir Al Sadr yang diteliti, yaitu gambaran konsep Alokasi Pendapatan Negara menurut Islam secara umum.

BAB III : BIOGRAFI

Pada bab ini akan memuat tentang biografi para ahli ekonomi islam antara lain: Ibnu Taimiyah dan Muhammad Baqir Al Sadr yang meliputi riwayat hidup, karya-karya dan pengaruhnya. Disini dijelaskan bagaimana perjalanan hidup para ahli, karya-karya yang telah dihasilkannya, dan bagaimana pengaruh pemikirannya dalam dunia Islam, dan khususnya dalam dunia tasawuf dan ekonomi Islam

BAB IV : PEMIKIRAN MENURUT IBNU TAIMIYAH DAN MUHAMMAD BAQIR AL SADR TENTANG ALOKASI PENDAPATAN NEGARA

Pada bab ini akan di kaji dan di analisis secara mendalam dan komprehensif tentang Alokasi Pendapatan Negara.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil yang di peroleh dari bab pembahahasan.

